

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019)

Ajeng Ayu Sabriani¹
ajengayusa01@gmail.com

Sri Rahayu²
sriahayu@telkomuniversity.ac.id

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom^{1,2}
Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung

Abstract

This study was conducted to analyze the effect of presenting financial statements and internal control systems simultaneously and partially on the accountability of regional financial management in the Tasikmalaya City SKPD in 2019. This study uses the presentation of financial statements and internal control system as independent variables, and the accountability of regional financial management as dependent variable. Data analysis method used is multiple regression analysis. This study shows that the presentation of financial statements and internal control systems has a significant positive effect simultaneously on the accountability of regional financial management. The financial statement presentation partially has a significant positive effect, and the internal control system partially has a significant positive effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: Presentation of Financial Statements, Internal Control Systems, Accountability of Regional Financial Management.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan, dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat selaku pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hardiningsih, 2019). Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dapat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Nurlaili, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Putri, 2017). Salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan secara baik dan utuh serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (Saripujiana,

2018). Selain itu, dengan adanya implementasi atas sistem pengendalian internal yang baik dan memadai, akan menjamin terwujudnya akuntabilitas yang baik dan tepat di masing-masing SKPD (Hardiningsih, 2019). Berdasarkan penilaian atas kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) II Tahun 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (www.bpk.go.id, 2019). Predikat WTP yang diraih Pemerintah Kota Tasikmalaya ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel (www.bpkp.go.id). Namun, dengan diraihnya opini WTP tersebut, menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, Pemerintah Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk mengembalikan penggunaan APBD kepada negara sebesar Rp 4,269 Miliar. Anggaran yang harus dikembalikan tersebut mayoritas berasal dari kegiatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Hal tersebut terjadi karena volume dari setiap kegiatan jembatan dan jalan diturunkan 10 persen sehingga membuat Pemkot Tasikmalaya melakukan kelebihan bayar kepada rekanan. Menurut Dodo Rosada S.H., selaku Ketua Pansus Tindak Lanjut LHP BPK 2018 DPRD Kota Tasikmalaya, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari SKPD (radartasikmalaya.com, 2019).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang beragam, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.* (2019), Putri (2017), Masyhur (2017), dan Fikrian (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.* (2019), Masyhur (2017), dan Sari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya riset *gap*, peneliti ingin mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Putri, 2017).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Menurut Superdi (2017), indikator dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah (1) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (2) Pertanggung jawaban kepada publik, (3) Terbuka, cepat dan tepat, (4) Penyusunan APBD, (5) Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Superdi, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya..
2. Andal, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dapat diverifikasi, serta menyajikan fakta secara jujur. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna.

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sari, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), struktur pengendalian internal terdiri atas lima unsur pokok. Kelima unsur pokok tersebut yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan dari suatu instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*), yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian suatu resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
4. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dari suatu instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan suatu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah pernah dilakukan antara lain oleh Hardiningsih *et al.* (2019) yang melakukan penelitian tentang Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Putri (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan metode analisis regresi berganda. Masyhur (2017) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan metode analisis regresi linier berganda. Selain itu. Selain itu, Fikrian (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sari (2017) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan analisis regresi linier berganda.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan pada 28 SKPD di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability*

sampling melalui sampel jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan selaku pengelola keuangan pada 28 SKPD di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 56 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+ \dots +b_nX_n+e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X1 = Penyajian Laporan Keuangan

X2 = Sistem Pengendalian Internal

α = Konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = Koefisien Regresi

e = epsilon

HASIL PENELITIAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Presentase	Kategori
Penyajian Laporan Keuangan	3080	2707	87,8%	Sangat Baik
Sistem Pengendalian Internal	2800	2461	87,9%	Sangat Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2800	2488	88,8%	Sangat Baik

Data diolah, 2019

Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik karena persentase yang ditunjukkan berada pada interval $\geq 84\%$ - 100%.

2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06166211
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.107
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi K-S (*Asymp.Sig*) sebesar $0,095 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

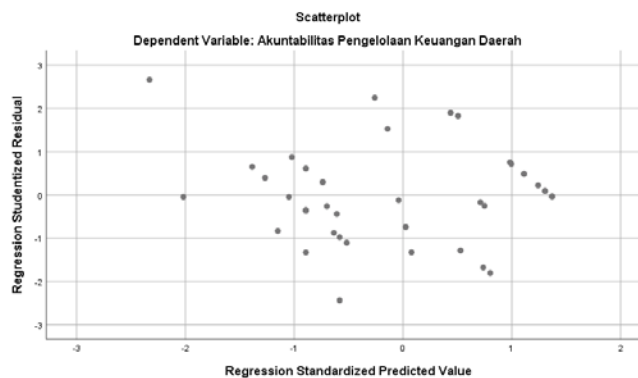
Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penyajian Laporan Keuangan	,409	2,448
	Sistem Pengendalian Internal	,409	2,448

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap variabel independen (variabel bebas) tidak memiliki hubungan multikolinearitas. Hal itu karena nilai *tolerance* dari variabel penyajian laporan keuangan (X1) dan variabel sistem pengendalian internal (X2) yaitu 0,409 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 2,448 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terdapat hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2).

C. Uji Heteroskedastisitas



Data diolah, 2019

Gambar 1 Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola tertentu, serta titik-titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) berdasarkan masukan variabel independen penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2).

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3.397	2.942	
	Penyajian Laporan Keuangan	.266	.093	.276
	Sistem Pengendalian Internal	.641	.093	.665

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Data diolah, 2019

Berdasarkan output pada tabel diatas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,397 + 0,266X_1 + 0,641X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,397 menunjukkan bahwa jika variabel penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal bernilai nol, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bernilai konstan.
2. Koefisien regresi sebesar 0,266 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan penyajian laporan keuangan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan.
3. Koefisien regresi sebesar 0,641 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan sistem pengendalian internal, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan.

4. Pengujian Hipotesis

A. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	.800	.793	2.100	1.573
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah					

Data diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,793 atau 79,3%. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen (bebas) yaitu penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 79,3%. Sedangkan sisanya sebesar 20,7% (100%-79,3%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

B. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	935.939	2	467.970	106.095	.000 ^b
	Residual	233.775	53	4.411		
	Total	1169.714	55			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan						

Data diolah, 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

C. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.397	2.942		1.155	.253
	Penyajian Laporan Keuangan	.266	.093	.276	2.873	.006
	Sistem Pengendalian Internal	.641	.093	.665	6.919	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Data diolah, 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda. Variabel penyajian laporan keuangan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) yang ditunjukkan pada tabel 6, tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau di bawah 0.05 (5%) sehingga H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi yang digambarkan pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,793 atau 79,3% yang berarti kedua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 79,3%, dan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan pada tabel 7, tingkat signifikansi penyajian laporan keuangan adalah sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05 (5%) sehingga H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kota Tasikmalaya. Nilai koefisien regresi sebesar 0,006 dengan arah positif. Artinya jika penyajian laporan keuangan memiliki kualitas yang semakin baik, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya akan semakin baik. Berdasarkan statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel penyajian laporan keuangan pada tabel 1 menunjukkan nilai sebesar 87,8% yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan dengan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami pada SKPD Kota Tasikmalaya berada dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terjadi karena laporan keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya telah disajikan dengan baik, benar dan memuat informasi yang utuh sehingga dapat memberikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan disajikan dengan lengkap serta jujur. Maka SKPD Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik dan menunjukkan bahwa pemerintah selaku pengelola dana publik dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardiningsih *et al.* (2019), Putri (2017), Masyhur (2017), dan Fikrian (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang ditunjukkan pada tabel 7, tingkat signifikansi sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 (5%) sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya. Nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan arah positif. Sehingga jika sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya akan semakin baik. Berdasarkan statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel sistem pengendalian internal pada tabel 1 menunjukkan nilai sebesar 87,9% yang berarti bahwa sistem pengendalian internal dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, serta pemantauan pada SKPD Kota Tasikmalaya berada dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terjadi karena sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh SKPD Kota Tasikmalaya, sehingga kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan akan berjalan secara efektif serta SKPD Kota Tasikmalaya dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.* (2019), Masyhur (2017), dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan, penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya. Lalu, secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

Bagi SKPD Kota Tasikmalaya agar dapat menyajikan laporan keuangan yang mampu menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih relevan serta dapat melaksanakan sistem pengendalian internal yang lebih optimal melalui pelaksanaan saluran komunikasi yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan yang signifikan sehingga dapat membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. [online]. <https://www.bpk.go.id/ihsps> [2 Oktober 2019].
- Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Faculty of Economics Riau University. *JOM Fekon*, 4(1), 265–279.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21–42.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Masyhur, M. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1), 1179–1192.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 483–497.
- Rizaldi, R. (2019). *BPK Sentil Pemkot Tasikmalaya Wajib Kembalikan Rp 4,269 Miliar*. [online]. <https://www.radartasikmalaya.com/bpk-sentil-pemkot-tasikmalaya-wajib-kembalikan-rp-4269-miliar/> [1 Oktober 2019].
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4(1), 571–586.
- Saripujana, Dian; Suriana, I. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan*, 355–359.
- Setyawati, D. (2019). *Opini WTP, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel*. [online]. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/22072/0/Opini-WTP-Bukti-Konsistensi-Pengelolaan-Kuangan-BPKP-yang-Akuntabel.bpkp> [4 Oktober 2019].
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangann; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; (studi empiris pada satuan kerja; perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1), 2015–2029.